
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 31 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Dra. RR. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Hasil capaian empat Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercapai 3,1397 atau masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4) dengan tingkat capaian indikator 104,66%;
2. Indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah tercapai 1,85% dengan tingkat capaian indikator 421,25%;
3. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan tercapai 94,67 dengan tingkat capaian indikator 111,44%; dan
4. Indikator indeks pelayanan publik tercapai 80,21 dengan tingkat capaian indikator 100,26%.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp18.975.087.679 dari total anggaran sebesar Rp21.204.162.534 sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.229.074.854 atau 10,51%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	2
1.3.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	5
1.3.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	10
1.3.3.1 Sumber Daya Manusia.....	10
1.3.3.2 Sarana dan Prasarana	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	18
2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran.....	19
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	24
2.2 Rencana Kerja	29
2.3 Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32

3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	32
3.1.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2017.....	35
3.1.3	Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda	37
3.1.4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Dibandingkan Dengan Kota Lain.....	38
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	40
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.1.6.1	Anggaran.....	43
3.1.6.2	Sumber Daya Manusia.....	43
3.1.6.3	Sarana dan Prasarana	43
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	44
3.2	Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV	PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah.....	10
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	11
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi	12
Tabel 1.7 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah	14
Tabel 2.1 Tujuan Sekretariat Daerah	19
Tabel 2.2 Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022	19
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	22
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018	24
Tabel 2.5 Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018.....	28
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2018	30
Tabel 3.1 Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2018	32
Tabel 3.2 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018.....	34
Tabel 3.3 Realisasi Program (<i>Outcome</i>) Sekretariat Daerah Tahun 2018	34
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Tahun 2017	35
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda.....	37
Tabel 3.6 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Secara Nasional.....	38
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2018.....	45
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2018	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	4
Gambar 3.1 Foto Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Yogyakarta Atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) Tahun 2018. Isi LKIP Setda tahun 2018 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2018 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2018.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2018 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

1.3 **Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**

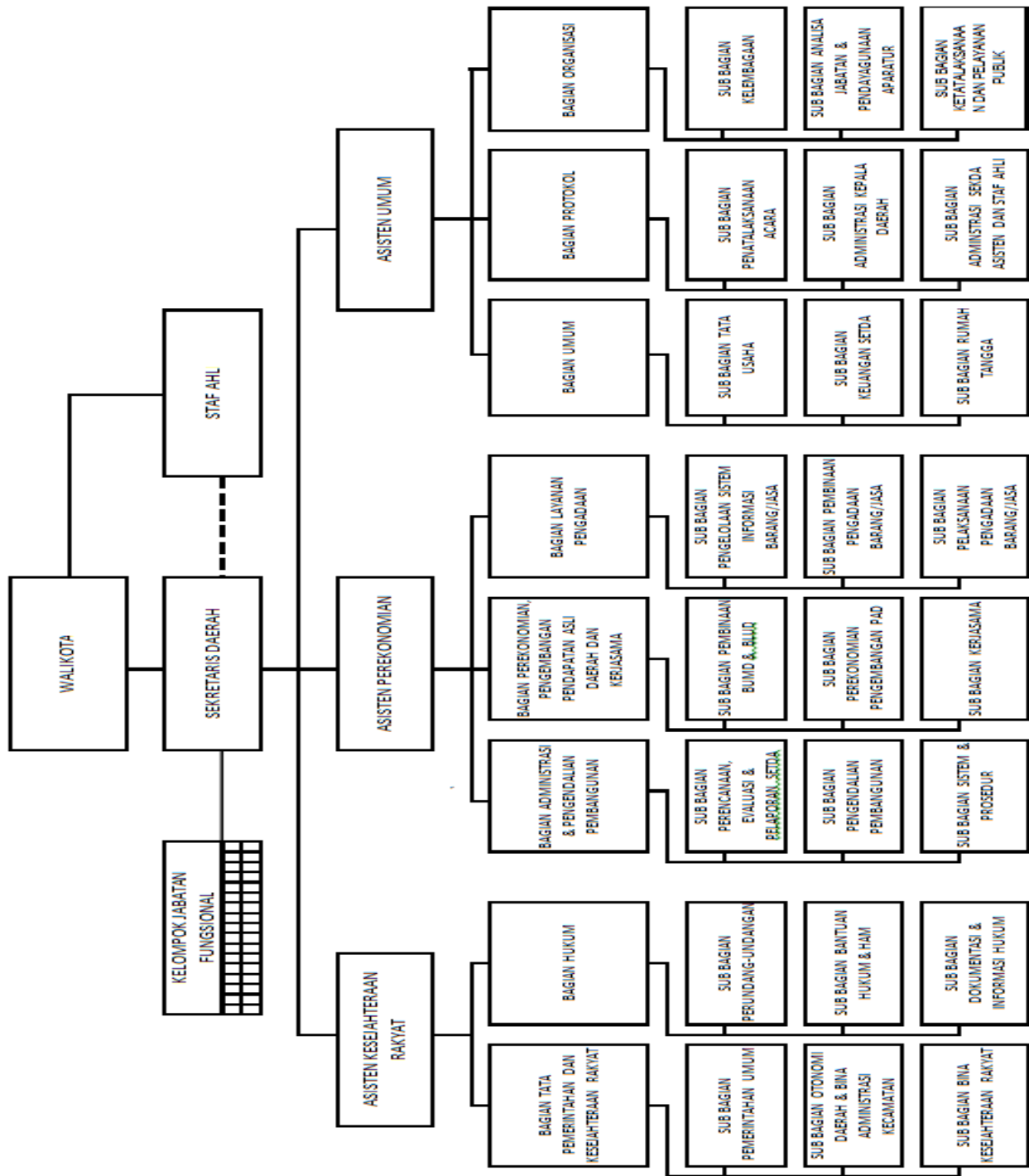
1.3.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.
 - 2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Asisten Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Protokol, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
 - 2) Bagian Umum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; dan
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan.

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.

Fungsi Bagian P3ADK:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
 - 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.
5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:
- Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan

pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6. Tugas pokok Bagian Umum:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha, bidang keuangan Sekretariat Daerah, serta bidang rumah tangga.

Fungsi Bagian Umum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.

Fungsi Bagian Protokol:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

1.3.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 165 orang (data per 2018). Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	-
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	-
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	7 orang
Kepala Sub Bagian	24 orang
Staf	106 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	25 orang
TOTAL	165 orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	21 orang
III	108 orang
II	10 orang
I	1 orang
TOTAL	140 orang

Tabel 1.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	5 orang
III	7 orang
IV	24 orang
Staf	104 orang
TOTAL	140 orang

Tabel 1.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	25 orang	17,86%
S1	75 orang	53,57%
D3	6 orang	4,29%
D2	-	-
SMA/SMK	31 orang	22,14%
SMP	3 orang	2,14%
SD	-	-
TOTAL	140 orang	100%

Tabel 1.5

Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	-	-
S1	9 orang	36%
D3	6 orang	24%
D2	1 orang	4%
SMA/SMK	8 orang	32%
SMP	1 orang	4%
SD	-	-
TOTAL	25 orang	100%

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-		-
Asisten Perekonomian	1					1 orang
Asisten Umum	-	-	-	-		-
Staf Ahli	3					3 orang
Bagian Umum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		13				13 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang
Bagian Organisasi						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS	2	8		1		11 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang

Staf PNS		10				10 orang
Staf non PNS (naban)					1	1 orang
Bagian Hukum						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		9	2			11 orang
Staf non PNS (naban)					2	2 orang
Bagian Protokol						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS	1	21	5			27 orang
Staf non PNS (naban)					6	6 orang
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian		3				3 orang
Staf PNS		3	2			5 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	-	-
Bagian Layanan Pengadaan						
Kepala Bagian	1					1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS	2	14	1			17 orang
Staf non PNS (naban)					5	5 orang
Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama						
Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian	1	2				3 orang
Staf PNS		10				10 orang
Staf non PNS (naban)					3	3 orang
TOTAL						165 orang

1.3.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	130
2	Access Point	2
3	AIR PURIFIER	32
4	Alat Pemotong/Penghancur Kertas	2
5	Alat Penghisap Asap Rokok	1
6	Alat Test Beton/Hammer Test Digital	2
7	Almari Besi	40
8	Almari kayu/kaca	95
9	ALMARI LOKER KENDALI BESI	3
10	Almari Rak	131
11	Bateray Charger	2
12	Bor listrik	1
13	Brankas	11
14	Cabinet rack + Roller (16 U)	1
15	Cash Box	2
16	Cassette Recorder	2
17	CCTV	2
18	Clip On	3
19	Coffe Table	2
20	Crossover Aktive	1
21	Delegate Unit	12
22	Digital Reverb & Multi Effect	1
23	Digital Voice Recorder	3
24	Document Camera/ Visualizer	1
25	Drive rack	1
26	DVD player	2
27	Dynamic Microphone	26
28	External Hardisk	41
29	Equalizer	3
30	Faxsimile	2
31	Filling Cabinet	140
32	Genset	5
33	GPS	2
34	Handphone	1
35	Handy Talky	15
36	Infrared transmitter	4
37	Jeep	3
38	Kamera Digital	29
39	Kamera Video Digital	6
40	Kipas Angin	23
41	Komputer PC	134

42	Komputer Tablet	15
43	Kursi Kerja	449
44	Kursi Kerja Wakil Walikota	1
45	Kursi Kerja Walikota	1
46	kursi makan	58
47	Kursi rapat	1292
48	Kursi Tamu	14
49	Layar LCD	18
50	LCD Projector	31
51	Lemari Arsip	18
52	Lemari Besi	23
53	Meja Bifet	6
54	MEJA CUBICAL	16
55	Meja Kerja Wakil Walikota	1
56	Meja Kerja Walikota	1
57	Meja kerja	344
58	Meja Knap	38
59	Meja Kursi Tamu	25
60	Meja Makan	12
61	MEJA OPERATOR	5
62	Meja Podium	3
63	meja tamu	3
64	Meja rapat	384
65	meja telpon	18
66	Mesin Facsimile	9
67	mesin ketik	17
68	Mesin Penghisap Debu	3
69	Mesin potong rumput	6
70	Mesin presensi sidik jari	8
71	Meteran Digital	2
72	microphone	3
73	Minibus	30
74	Mixer	7
75	MONITOR LED 19	1
76	Notebook	80
77	papan pengumuman	2
78	Pesawat telephone	16
79	Pick Up	1
80	Pompa Air	12
81	Power Amplifier	14
82	Printboard Elektronik + stand	4
83	Printer	88
84	Radio tape	6
85	Rak Besi	14
86	Receiver Infrared	2
87	Sedan	2

88	Scanner	20
89	Sepeda	25
90	Sepeda Motor	34
91	Sketmach Digital	3
92	Snake cable + hard case	1
93	Sofa	8
94	SOUND SYSTEM	3
95	Speaker	35
96	stabilisator	8
97	Spliter	1
98	Stage Monitor Processor, Sound Standard 1000	1
99	Stand Microphone	10
100	tape recorder	3
101	Telepon	26
102	Tempat Parkir Sepeda	1
103	Tiang Mik Duduk	7
104	Televisi	46
105	UPS	77
106	Tool kit Set	1
107	TX/RX Infrared Recevier	4
108	Web Camera	3
109	White Board	47
110	Wireless	24
111	Zice	2

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

1.3.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

1.3.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

1.3.3.2 Sarana dan Prasarana

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran
 - 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
 - 2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 2.2 Rencana Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
 - 3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2017
 - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda
 - 3.1.4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Dibandingkan Dengan Kota Lain
 - 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
 - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.6.1 Anggaran
 - 3.1.6.2 Sumber Daya Manusia
 - 3.1.6.3 Sarana dan Prasarana
 - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2018 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
2	Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Indeks Pelaksanaan Pembangunan
3	Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik

Tabel 2.2
Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	2,12%	2,08%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	84,95	86,05	87,15	88,25	89,35
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81

2.1.2 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran

- Capaian indikator sasaran nilai EKPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.
- Formula indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

$$\left[\frac{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun } n - \text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun } n-1}{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun } n-1} \right]$$

- Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan:

$$\left[\begin{array}{c} 70\% \text{ Kinerja Pengendalian} \\ \text{Pembangunan} \end{array} + 30\% \text{ Kinerja Layanan Pengadaan} \right]$$

- ❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula:

1.) **$RK = \sum i-j RO$**

RK = realisasi kegiatan

RO = realisasi output dari awal s.d akhir

$ROi = (roi \times BOi)/100$

ROi = realisasi setiap output terhadap kegiatan (tertimbang)

roi = realisasi setiap output dalam %

$BOi = \frac{\text{anggaran output} \times 100\%}{\sum i-j \text{ anggaran output}}$

$\sum i-j \text{ anggaran output}$

BOi = bobot setiap output dalam %

2.) **$RD = \frac{\sum (RKi-j \times BKi-j)}{100\%}$**

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BKi = \frac{\text{anggaran kegiatan} \times 100\%}{\sum i-j \text{ anggaran kegiatan}}$

$\sum i-j \text{ anggaran kegiatan}$

BD = bobot kegiatan dalam %

3.) **$RT = \frac{\sum (RDi-j \times BDi-j)}{100\%}$**

RT = realisasi total

RD = realisasi SKPD/unit kerja

$BDi = \frac{\text{anggaran SKPD/unit kerja} \times 100\%}{\sum i-j \text{ anggaran SKPD/unit kerja}}$

$\sum i-j \text{ anggaran SKPD/unit kerja}$

BD = bobot SKPD/unit kerja dalam %

i = awal

j = akhir

- ❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelangkan}} \times 100\% \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 100\% \times 40\% \right]$$

- Indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD}}{\sum \text{jumlah layanan}}$$

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 7	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	1 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Meningkatkan pengamanan batas wilayah kota 3 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan 4 Meningkatkan Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji 5 Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan 6 Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
		Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1 Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan 2 Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD 3 Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum 4 Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 5 Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum 6 Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
2 Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	2 Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	1 Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah 3 Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD 4 Membentuk BPR syariah 5 Mengoptimalkan peran XT square terhadap pemberdayaan UMKM 6 Meningkatkan kualitas kerjasama daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan 2 Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis 3 Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
		Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa 2 Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan 3 Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan 4 Meningkatkan penyelesaian permasalahan pengadaan
3 Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	3 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1 Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 2 Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan 3 Meningkatkan pembinaan pelayanan publik 4 Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah 5 Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah 6 Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
		Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kerumahtanggaan 2 Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 3 Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
		Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta

2.1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2018 ada 31 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%
a	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		
b	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		
c	Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
b	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%
a	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%
a	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD		
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%
a	Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan pendayagunaan aparatur		
b	Kegiatan Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Standarisasi		
c	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi		
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp547 milyar
a	Kegiatan perekonomian pengembangan PAD		
b	Kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD		
c	Kegiatan kerjasama daerah		
7	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
a	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah		
b	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta		
c	Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli		
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,5%
a	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda		
b	Kegiatan Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan		
c	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan		
9	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	60%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	72,5%
a	Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa		
b	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa		
c	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa		
10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	77%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang
a	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum		
b	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan		
c	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%
a	Kegiatan peraturan perundang-undangan		
b	Kegiatan bantuan hukum		
c	Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah		
12	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5
a	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan		
b	Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah		
c	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Yogyakarta. Anggaran untuk Tahun 2018 sebesar Rp 31.869.764.093 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan besaran anggaran Rp 10.665.601.559 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 21.204.162.534 (Dua puluh satu milyar dua ratus empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Tabel 2.5
Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.812.668.655
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2.432.616.000
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.675.264.501
	Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	704.788.154
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.296.826.090
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	501.286.200
	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	795.539.890
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.500.000
	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	99.500.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.782.040
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	51.782.040
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1.542.192.878
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	500.882.050
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	761.095.628
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	280.215.200
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	625.792.800
	Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah	107.838.200
	Kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD	177.556.600
	Kegiatan kerjasama daerah	340.398.000
7	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1.752.703.668
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	306.491.170
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1.317.021.899
	Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli	129.190.599
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	502.787.972
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda	50.227.206
	Kegiatan Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	178.450.354

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	274.110.412
9	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	666.246.184
	Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa	188.185.412
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	260.121.206
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	217.939.566
10	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	3.040.260.655
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	453.548.240
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	2.032.464.265
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	554.248.150
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	2.121.419.814
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	1.301.400.000
	Kegiatan bantuan hukum	432.840.000
	Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah	387.179.814
12	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat	3.691.981.778
	Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan	2.918.902.278
	Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah	752.436.000
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	20.643.500
	TOTAL	21.204.162.534

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,44%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	84,95
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Rp 3.040.260.655	Perubahan APBD TA 2018
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.121.419.814	Perubahan APBD TA 2018
3.	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Rp 625.792.800	Perubahan APBD TA 2018

4.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Rp 502.787.972	Perubahan APBD TA 2018
5.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp 666.246.184	Perubahan APBD TA 2018
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Rp 1.542.192.878	Perubahan APBD TA 2018
7.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Rp 3.691.981.778	Perubahan APBD TA 2018
8.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Rp 1.752.703.668	Perubahan APBD TA 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dengan realisasinya.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (3,1397)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,44%	1,85%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	84,95	94,67
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80	80,21

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2017. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah). Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\
 &= 2,9397 + 0,2 \\
 &= 3,1397
 \end{aligned}$$

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

b. Persentase Peningkatan PAD diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n} - \text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}}{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}} \right]$$

$$= ((\text{Rp}642.229.922.879 - \text{Rp}630.542.797.082) / \text{Rp}630.542.797.082) \times 100\%$$

$$= 1,85\%$$

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$\left[\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelangkan}} \times 100\% \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 100\% \times 40\% \right] \right] \times 30\%$$

$$+ \left[\left[(\text{Realisasi SKPD/Unit Kerja} \times \text{Bobot SKPD/Unit Kerja}) / 100\% \right] \times 70\% \right]$$

$$= (((137/162 \times 100\% \times 60\%) + ((107/120 \times 100\%) + (104/120 \times 100\%))/2 \times 100\% \times 40\%) \times 30\%) + (98,42\% \times 70\%)$$

$$= 25,77 + 68,89$$

$$= 94,67$$

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 3.2
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	60	4.613,80
2	Kecamatan	36	2.924,20
3	Puskesmas	47	3.849,04
4	TK dan SD	160	12.916,97
	TOTAL	303	24.304,01

Formula indeks pelayanan publik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD}}{\sum \text{jumlah layanan}}$$

$$= (4.613,8+2.924,2+3.849,04+12.916,97)/303$$

$$= 80,21$$

Tabel 3.3
Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2018

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	77%	73,34%	95,25%
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang (nilai 201-350)	Cepat berkembang (nilai 363)	103,71%
2	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%
3	Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp547 milyar	Rp642.229.922.879	117,41%
4	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,5%	98,42%	105,26%
5	Pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	60%	84,57%	140,95%
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	72,5%	87,92%	121,27%
6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%	139,21%	198,87%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5	81,16	103,39%
8	Pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25	80,71	100,57%

Indikator persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi hanya tercapai 73,34% atau 95,25% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target tahun 2018 karena:

- 1) Untuk urusan lingkungan hidup (diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta) terjadi penurunan prestasi dibanding tahun 2017 yang semula berada pada prestasi tinggi dengan skor 2,75 menjadi sedang dengan skor 1,85 di tahun 2018.
- 2) Untuk urusan fungsi penunjang (diampu oleh Bappeda Kota Yogyakarta) terjadi penurunan prestasi dibanding tahun 2017 yang semula pada prestasi sangat tinggi dengan skor 3,62 menjadi sedang dengan skor 1,17 di tahun 2018.
- 3) Untuk urusan kearsipan (diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) terjadi penurunan prestasi dibanding tahun 2017 yang semula pada prestasi sangat tinggi dengan skor 3,5 menjadi sedang dengan skor 1,5 di tahun 2018.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2017

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	
			2017	2018
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPP)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1397)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	22,5%	1,85%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	90,65	94,67
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	79,77	80,21

Indikator sasaran nilai EKPPD tahun 2018 memperoleh predikat sangat tinggi sama dengan tahun 2017. Namun untuk nilai yang diperoleh pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan oleh:

1. Untuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan terjadi penurunan prestasi yang semula prestasi sangat tinggi sebanyak 15 urusan menjadi 10 urusan.
2. Untuk urusan pemerintahan dengan prestasi sedang mengalami peningkatan dari 5 urusan di tahun 2017 menjadi 7 di tahun 2018 sehingga skor menjadi turun dari tahun sebelumnya.

Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 memperoleh hasil yang positif, artinya PAD tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat Tabel 3.4 peningkatan PAD tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 terjadi lonjakan pendapatan yang sulit diprediksi dari BPHTB sebesar Rp50 milyar.

Indikator indeks pelaksanaan pembangunan tahun 2018 meningkat 4,43% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan indikator indeks pelayanan publik tahun 2018 meningkat 0,55% dibandingkan tahun 2017.

3.1.3 Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Sasaran					
			2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1397)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah Indeks Pelaksanaan Pembangunan Indeks Pelayanan publik	22,50%	1,85%	7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	2,12%	2,08%
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		90,65	94,67	86,1	84,95	86,05	87,15	88,25	89,35
			79,77	80,21	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

3.1.4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Dibandingkan Dengan Kota Lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Kota Yogyakarta berada di peringkat ke-22 dari 93 daerah Kota secara nasional dengan skor 3,2733 (status: sangat tinggi). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Secara Nasional

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Kota Malang	1	3,5760	ST
2	Kota Makasar	2	3,5174	ST
3	Kota Surabaya	3	3,5115	ST
4	Kota Blitar	4	3,4616	ST
5	Kota Gorontalo	5	3,4196	ST
6	Kota Semarang	6	3,4142	ST
7	Kota Bandung	7	3,4110	ST
8	Kota Tangerang	8	3,4020	ST
9	Kota Samarinda	9	3,3995	ST
10	Kota Parepare	10	3,3926	ST
11	Kota Sukabumi	11	3,3879	ST
12	Kota Cimahi	12	3,3590	ST
13	Kota Kediri	13	3,3301	ST
14	Kota Magelang	14	3,3080	ST
15	Kota Payakumbuh	15	3,3077	ST
16	Kota Tasikmalaya	16	3,2901	ST
17	Kota Metro	17	3,2889	ST
18	Kota Bogor	18	3,2860	ST
19	Kota Banjar	19	3,2782	ST
20	Kota Bontang	20	3,2775	ST
21	Kota Surakarta	21	3,2770	ST
22	KOTA YOGYAKARTA	22	3,2733	ST
23	Kota Depok	23	3,2670	ST
24	Kota Probolinggo	24	3,2442	ST
25	Kota Madiun	25	3,2399	ST
26	Kota Cirebon	26	3,2383	ST
27	Kota Cilegon	27	3,2237	ST
28	Kota Pontianak	28	3,2226	ST
29	Kota Bukittinggi	29	3,2205	ST
30	Kota Bekasi	30	3,2154	ST
31	Kota Ambon	31	3,2076	ST
32	Kota Palopo	32	3,1887	ST
33	Kota Balikpapan	33	3,1694	ST
34	Kota Mojokerto	34	3,1683	ST

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
35	Kota Tanjungpinang	35	3,1662	ST
36	Kota Pekalongan	36	3,1587	ST
37	Kota Mataram	37	3,1564	ST
38	Kota Denpasar	38	3,1530	ST
39	Kota Batam	39	3,1431	ST
40	Kota Banjarmasin	40	3,1391	ST
41	Kota Padang	41	3,1351	ST
42	Kota Salatiga	42	3,1289	ST
43	Kota Batu	43	3,1270	ST
44	Kota Pasuruan	44	3,1032	ST
45	Kota Palembang	45	3,0768	ST
46	Kota Solok	46	3,0734	ST
47	Kota Tangerang Selatan	47	3,0701	ST
48	Kota Tebing Tinggi	48	3,0687	ST
49	Kota Jambi	49	3,0668	ST
50	Kota Sawahlunto	50	3,0546	ST
51	Kota Pekanbaru	51	3,0481	ST
52	Kota Tegal	52	3,0358	ST
53	Kota Pariaman	53	3,0341	ST
54	Kota Kotamobagu	54	3,0271	ST
55	Kota Tidore Kepulauan	55	3,0255	ST
56	Kota Jayapura	56	3,0224	ST
57	Kota Prabumulih	57	3,0161	ST
58	Kota Baubau	58	2,9997	T
59	Kota Bima	59	2,9954	T
60	Kota Sungai Penuh	60	2,9868	T
61	Kota Bitung	61	2,9833	T
62	Kota Medan	62	2,9825	T
63	Kota Palu	63	2,9807	T
64	Kota Banjarbaru	64	2,9787	T
65	Kota Pagar Alam	65	2,9768	T
66	Kota Lubuklinggau	66	2,9761	T
67	Kota Bandar Lampung	67	2,9745	T
68	Kota Banda Aceh	68	2,9686	T
69	Kota Kendari	69	2,9677	T
70	Kota Serang	70	2,9606	T
71	Kota Tarakan	71	2,9520	T
72	Kota Kupang	72	2,9434	T
73	Kota Pangkalpinang	73	2,9118	T
74	Kota Padang Panjang	74	2,9103	T
75	Kota Binjai	75	2,8884	T
76	Kota Ternate	76	2,8731	T
77	Kota Manado	77	2,8575	T
78	Kota Sorong	78	2,8425	T
79	Kota Langsa	79	2,8334	T
80	Kota Dumai	80	2,8230	T
81	Kota Tomohon	81	2,8054	T
82	Kota Pematangsiantar	82	2,7931	T
83	Kota Bengkulu	83	2,7803	T
84	Kota Padangsidimpuan	84	2,7313	T

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
85	Kota Singkawang	85	2,6839	T
86	Kota Sabang	86	2,6819	T
87	Kota Sibolga	87	2,6710	T
88	Kota Tual	88	2,6640	T
89	Kota Lhokseumawe	89	2,6330	T
90	Kota Palangka Raya	90	2,5977	T
91	Kota Tanjungbalai	91	2,5570	T
92	Kota Subulussalam	92	2,5408	T
93	Kota Gunung Sitoli	93	2,4590	T

Gambar 3.1
Foto Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Yogyakarta
Atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

a. Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target EKPPD tahun 2018 adalah tinggi (skala 2-3). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2017 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,1397. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4). Jika dihitung dalam persentase maka tingkat capaian indikator EKPPD sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= \text{indeks realisasi EKPPD} / \text{indeks target EKPPD} \times 100\% \\
 &= 3,1397 / 3,0001 \times 100\% \\
 &= 104,66\%
 \end{aligned}$$

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2) Melaksanakan desk pencermatan IKK.
- 3) Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat DIY.

b. Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Indikator ini pada tahun 2018 ditargetkan meningkat sebesar 0,44% sementara realisasinya sebesar 1,85%. Tingkat capaian indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi persentase peningkatan PAD} / \text{target persentase peningkatan PAD} \times 100\% \\ &= 1,85\% / 0,44\% \times 100\% \\ &= 421,25\% \end{aligned}$$

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi secara non tunai;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertib dalam memenuhi kewajibannya;
- 3) Mengintensifkan penagihan tunggakan dan pemeriksaan pajak untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak;
- 4) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk pendataan Wajib Pajak baru;
- 5) Penyempurnaan sistem pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem; dan
- 6) Ekstensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan (IPP)

Indikator ini merupakan gabungan indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar ketepatan waktu, dan indikator persentase pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar tingkat layanan. Indikator ini pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 84,95

sementara realisasinya sebesar 94,67. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\%$$

$$= 94,67 / 84,95 \times 100\%$$

$$= 111,44\%$$

Faktor – faktor atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi yang intensif dengan OPD dalam pengentrian SiRUP;
- 2) Proses pelaksanaan lelang sesuai tatakala yang ada di SiRUP;
- 3) Pemahaman pelaku pengadaan (PPKom) terkait regulasi pengadaan barang jasa semakin baik;
- 4) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 5) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
- 6) Sosialisasi kepada PPTK setiap akhir tahun dengan penekanan pada cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan;
- 7) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan; dan
- 8) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 80 tercapai 80,21. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

$$= \text{realisasi Indeks Pelayanan Publik} / \text{target Indeks Pelayanan Publik} \times 100\%$$

$$= 80,21 / 80 \times 100\%$$

$$= 100,26\%$$

Faktor – faktor yang menyebabkan dapat dicapainya target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
- 3) Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPP; dan
- 4) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.1 Anggaran

Untuk mencapai target empat indikator yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menganggarkan belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp 21.204.162.534. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 18.975.088.091,62 atau 89,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 1,39% (penyerapan tahun 2017 sebesar 88,1%). Dengan tingkat capaian indikator EKPPD sebesar 104,66%, tingkat capaian indikator peningkatan PAD sebesar 421,25%, tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar 111,44% dan tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar 100,26% hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.229.074.442,38 atau 10,51%.

3.1.6.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per tahun 2018 jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 165 orang, dengan rincian 140 orang PNS dan 25 orang tenaga bantuan. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi anjab pada masing-masing Bagian/Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengangkat tenaga teknis.

3.1.6.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. SIM Agenda Rapat yang diampu Bagian Umum;
2. SIM Penerimaan Tamu yang diampu Bagian Protokol;
3. SIM Pelaporan yang diampu Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
4. SIM e-LAKIP yang diampu Bagian Organisasi;
5. SIM Organisasi yang diampu Bagian Organisasi; dan
6. SIM BLUD yang diampu Bagian P3ADK.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator nilai EKPPD dapat tercapai karena didukung dengan program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Indikator persentase peningkatan PAD dapat tercapai melebihi target karena didukung dengan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah, kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dan kegiatan kerjasama daerah.

Indikator indeks pelaksanaan pembangunan dapat tercapai karena didukung dengan program pengendalian pelaksanaan pembangunan dan program pelayanan pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang mendukung kedua program tersebut adalah kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda, kegiatan Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa, kegiatan operasional pengadaan barang/jasa, dan kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa .

Indikator indeks pelayanan publik dapat tercapai karena didukung program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, dan program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung ketiga program tersebut adalah kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, kegiatan pemantapan pelayanan publik, kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah, kegiatan pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah, pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja & standarisasi, kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta, kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli, kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah, dan kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2 **Realisasi Anggaran**

Anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 sebesar Rp 31.869.764.093 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat

ribu sembilan puluh tiga rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan besaran anggaran Rp 10.665.601.559 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 21.204.162.534 (Dua puluh satu milyar dua ratus empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan	10.665.601.559	10.042.271.241	94,16%

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.812.668.655	5.335.899.627	91,80%
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2.432.616.000	2.202.493.679	90,54%
	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.675.264.501	2.446.696.537	91,46%
	Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	704.788.154	686.709.411	97,43%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.296.826.090	1.059.793.344	81,72%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	501.286.200	498.821.300	99,51%
	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	795.539.890	560.972.044	70,51%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99.500.000	78.872.900	79,27%
	Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	99.500.000	78.872.900	79,27%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.782.040	42.318.665	81,72%
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD	51.782.040	42.318.665	81,72%
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1.542.192.878	1.025.049.121	66,47%
	Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	500.882.050	456.481.499	91,14%

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi	761.095.628	303.924.839	39,93%
	Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	280.215.200	264.642.784	94,44%
6	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	625.792.800	568.441.761	90,84%
	Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah	107.838.200	100.752.495	93,43%
	Kegiatan optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD	177.556.600	176.035.350	99,14%
	Kegiatan kerjasama daerah	340.398.000	291.653.916	85,68%
7	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1.752.703.668	1.590.935.942	90,77%
	Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	306.491.170	283.625.163	92,54%
	Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	1.317.021.899	1.193.804.872	90,64%
	Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli	129.190.599	113.505.908	87,86%
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	502.787.972	441.171.048	87,74%
	Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda	50.227.206	47.660.102	94,89%
	Kegiatan Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan	178.450.354	134.106.342	75,15%
	Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	274.110.412	259.404.605	92,25%
9	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	666.246.184	623.474.567	93,58%
	Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa	188.185.412	167.799.288	89,17%
	Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa	260.121.206	254.619.804	97,89%
	Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa	217.939.566	201.055.475	92,25%
10	Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	3.040.260.655	2.884.780.068	94,89%
	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	453.548.240	426.061.242	93,94%
	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan	2.032.464.265	1.935.420.148	95,23%
	Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	554.248.150	523.298.677	94,42%
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	2.121.419.814	2.006.396.864	94,58%
	Kegiatan peraturan perundang-undangan	1.301.400.000	1.247.612.680	95,87%
	Kegiatan bantuan hukum	432.840.000	394.707.750	91,19%
	Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah	387.179.814	364.076.434	94,03%
12	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	3.691.981.778	3.317.953.774	89,87%
	Kegiatan pelayanan kerumahtangaan	2.918.902.278	2.835.432.196	97,14%

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah	752.436.000	467.946.078	62,19%
	Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	20.643.500	14.575.500	70,61%
	TOTAL	21.204.162.534	18.975.087.679	89,49%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu: nilai EKPPD, persentase peningkatan PAD, indeks pelaksanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik semuanya tercapai.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan efektif yang dibuktikan dengan tingkat capaian indikator sasaran di atas 100%, masing – masing sebagai berikut:
 - a. Nilai EKPPD dengan tingkat capaian 104,66%;
 - b. Persentase peningkatan PAD dengan tingkat capaian 421,25%;
 - c. Indeks pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 111,44%; dan
 - d. Indeks pelayanan publik dengan tingkat capaian 100,26%.
3. Usaha/kegiatan yang mendorong tercapainya target indikator nilai EKPPD adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - b. Melaksanakan desk pencermatan IKK;
 - c. Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat DIY.
4. Faktor – faktor atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan PAD adalah:
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi secara non tunai;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertib dalam memenuhi kewajibannya;

-
- c. Mengintensifkan penagihan tunggakan dan pemeriksaan pajak untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak;
 - d. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk pendataan Wajib Pajak baru;
 - e. Penyempurnaan sistem pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem; dan
 - f. Ekstensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Faktor – faktor atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah:
- a. Koordinasi yang intensif dengan OPD dalam pengentrian SiRUP;
 - b. Proses pelaksanaan lelang sesuai tatakala yang ada di SiRUP;
 - c. Pemahaman pelaku pengadaan (PPKom) terkait regulasi pengadaan barang jasa semakin baik;
 - d. Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
 - f. Sosialisasi kepada PPTK setiap akhir tahun dengan penekanan pada cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan; dan
 - g. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan.
6. Faktor – faktor yang mendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah:
- a. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPP; dan
 - d. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp 2.229.074.854 atau 10,51%.

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Yogyakarta, 31 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Dra. RR. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010